2.3. Permasalahan Pembangunan Dan Isu Strategis Tahun 2016

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data sebelumnya, yang menunjukkan beberapa indikator makro yang mengalami peningkatan. Namun demikian dalam perjalanannya, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi beberapa permasalahan, sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016, maka Perumusan isu strategis dan masalah mendesak didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi pencapaian target sesuai visi dan misi dalam RPJMD 2012-2016 yang diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Berdasarkan kondisi pencapaian target Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016, maka Permasalahan pembangunan yang dihadapi tersebut dibagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu menurut Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Millenium Development Goals (MDGs)
   a. Mengurangi tingkat kematian anak
   b. Meningkatkan kesehatan ibu
   c. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular
   d. Menjamin Kelestarian Lingkungan
2. Sarana dan Prasarana Teknologi

   Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi seperti jaringan telekomunikasi dan sarana layanan internet, terutama pada wilayah-wilayah terpencil
3. SDM Aparatur

   Belum optimalnya sumber-sumber daya dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah
4. SDM Masyarakat

   Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan oleh peringkat IPM dan IPG

5. Perlindungan ibu dan anak

   Keterbatasan lembaga pelayanan dan perlindungan ibu dan anak serta penyandangan masalah kesejahteraan sosial lainnya
6. Sarana dan prasarana PAUD

   Masih rendahnya akses dan pelayanan pengembangan anak usia dini
7. Angka buta huruf

   Masih tingginya angka buta huruf
8. Pembinaan kepemudaan dan olahraga
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana, pembinaan kelembagaan dan prestasi olahraga dan kepemudaan
10. Komoditas unggulan daerah

    Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah
11. Jaringan transportasi

    Masih rendahnya cakupan layanan jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah
12. Energi listrik

    Masih terbatasnya energi listrik dalam menunjang seluruh aktivitas baik untuk rumah tangga dan industri serta perkantoran
13. Wilayah perbatasan dan pulau terpencil
14. Belum maksimalnya pembangunan di wilayah perbatasan, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan
15. Good governance
16. Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan prinsip Good Governance
17. Sumber Daya Alam

    Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
18. Mitigasi bencana
19. Belum optimalnya mitigasi bencana pada daerah-daerah rawan bencana
20. Air bersih dan sanitasi lingkunan

    Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Disamping permasalahan pembangunan tersebut di atas, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016, juga diidentifikasi permasalahan pembangunan sesuai dengan isu strategis pada masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana berikut ini :

1. Urusan Pendidikan
   a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan disetiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
   b. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas di setiap tingkatan pendidikan
   c. Masih rendahnya pelayanan PAUD Penguasaan

2. Urusan Kesehatan
   a. Masih tingginya Angka Kematian bayi dan Ibu
   b. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan
   c. Belum terpenuhinya jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan
   d. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor
   e. Belum otimalnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat esensial penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaran pelayanan kefarmasian yang berkualitas
   f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal
   g. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan data dan informasi kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum
   a. Masih rendahnya kapasitas jalan provinsi
   b. Belum tersusunnya perencanaan data base jalan berbasis GIS
   c. Belum adanya data base yang dapat diakses melalui internet
   d. Rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dan pusat produksi serta industri
   e. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi
   f. Masih terjadinya abrasi dan belum berkembangnya potensi wisata Pantai
   g. Masih tingginya pantai yang terkena abrasi
   h. Belum tersedianya data dasar daerah irigasi berbasis Web.GIS
   i. Pemanfaatan yang masih minim hasil perencanaan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan daerah irigasi
   j. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan air irigasi
   k. Masih kurangnya sarana dan prasarana jaringan irigasi
   l. Kurang efektif dan efisiennya penggunaan air irigasi
   m. Belum terjaminnya keberlanjutan pemanfaatan jaringan irigasi
   n. Rendahnya kualitas kawasan permukiman berbasis tata ruang
   o. Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh /nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat
   p. Masih rendahnya kualitas jalan yang berbasis tata ruang
   q. Belum adanya sistem jaringan jalan yang andal berbasis tata ruang
   r. Belum tersedianya Perda Rencana Detail dan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   s. Belum tersedianya Pedoman Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang
   t. Rendahnya Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
   u. Rendahnya Pemanfaatan Kawasan Strategis Provinsi
   v. Belum terlaksananya penggunaan teknologi canggih di dalam pelaksanaan penataan ruang
   w. Belum konsistennya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Program dan kegiatan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang
   x. Masih rendahnya Pembinaan Penataan Ruang
   y. Rendahnya kualitas bangunan dan kawasan perkantoran pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat berbasis tata ruang

z. Belum terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Serta Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat.

4. Urusan Perencanaan Pembangunan
   a. Belum terintegrasinya dengan baik perencanaan antar daerah yang ada, baik di antar provinsi serta Provinsi dan Kabupaten
   b. Belum optimalnya SDM yang mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai
   c. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja SKPD
   d. Sistem pengumpulan dan akurasi data masih belum optimal
   e. Koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar SKPD masih belum optimal.

5. Urusan Perhubungan
   a. Terbatasnya pendanaan untuk membiayai sarana dan prasaran perhubungan, baik laut, darat maupun udara
   b. Di bidang transportasi laut adalah rendahnya pangsa armada pelayaran nasional, baik angkutan dalam negeri maupun luar negeri. Kesiapan penyediaan sarana transportasi laut perlu didukung dengan ketersediaan prasarana pokok dan fasilitas penunjang transportasi laut yang memadai. Dewasa ini diperlukan kebijakan khusus di bidang transportasi laut untuk turut menunjang tetap tegaknya kedaulatan NKRI khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan negara lain
   c. Di bidang transportasi udara Kebijakan membuka pasar (multi operator) bagi kegiatan transportasi udara belum mampu menarik minat maskapai untuk membuka jalur penerbangan ke Sulawesi Barat.

6. Urusan Lingkungan Hidup
   a. Masalah lingkungan masih belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
   b. Masalah pembiayaan yang terbatas sehingga beberapa indikator kinerja dilakukan dengan pembiayaan pusat melalui dana

dekonsentrasi sehingga sasaran objek capaian belum memenuhi sasaran objek dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

c. Beberapa indikator seperti Peresentase penduduk berakses air minum dan Persentase luas pemukiman yang tertata dilakukan oleh instansi lain yang juga merupakan mitra bersama dalam urusan wajib lingkungan hidup, dalam hal ini dilakukan oleh instansi Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tarkim.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya pada Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender masih sangat rendah
   b. Masih rendahnya keterlibatan perempun atau kesetaraan gender dalam jabatan politik dan jabatan publik
   c. Perempuan masih mengalami diskrimansi dalam memperoleh akses pendidikan dan keterampilan oleh karena itu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas didominasi oleh kaum perempuan
   d. Masih kuranganya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses, manfaat serta kontrol dalam pembangunan akibatnya kemiskinan lebih banyak diderita perempuan daripada laki-laki
   e. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan cukup tinggi dan juga separuh dari perempuan mengalami asupan gizi yang kurang
   f. Masih rendahnya anak untuk memperoleh akses pendidikan utamannya pada pendidikan dasar
   g. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi dan asupan gizi yang kurang
   h. Kekerasan dan diskrimanasi masih sering dialami oleh anak-anak
   i. Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat tingginya angka kelahiran.

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
   a. Tingginya angka kelahiran disebabkan oleh masih rendahnya penggunaan alat kontrasespsi
   b. Kualitas dan produktifitas remaja masih rendah.

9. Urusan Sosial
   a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas
   b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain
   c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran
   d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri
   e. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
   f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih kurang
   g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal
   h. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehjahteraan sosial, dana, sarana dan Prasarana.

10. Urusan Ketenagakerjaan
   a. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai
   b. Sarana dan prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK belum memadai serta output dari BLK belum sepenuhnya mampu untuk mandiri
   c. Belum terbangunnya Gedung dan Sarana Prasanaran UPTD BLK, BPPD dan Balatrans provinsi Sulawesi Barat sebgai tempat peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat
   d. Belum lengkapnya sarana prasarana dan Sumber daya manusia yang akan mengelola Bursa kerja On Line berupa Indeks pencari kerja dalam pencapaian penempatan tenaga kerja di sektor informal

e. Pembentukan LKS Bipartit antar pengusaha dan Serikat pekerja belum maksimal, karena belum semua perusahaan di Sulawesi Barat memiliki PP/PKB dan serikat pekerja di perusahaan
f. Pengawasan Ketenagakkerjaan belum maksimal disebabkan masih minimnya sarana prasarana pemeriksaan K3 di lapangan serta masih minimnya pengetahuan perusahaan skala kecil menengah akan pentingnya penerapan SMK3 di Perusahaan.

11. Urusan Koperasi dan UKM
    a. Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha, olehnya itu gerakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) harus dimaksimalkan
    b. Belum kuatnya terbangun komitmen antara Pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
    c. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan menumbuhkan Koperasi menjadi prioritas, namun kenyataannya masih banyak Koperasi yang tidak aktif
    d. Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha, olehnya itu gerakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) harus dimaksimalkan
    e. Belum terosialisasinya dengan baik Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) Tahun 2016, bidang pembinaan UKM.

12. Urusan Penanaman Modal
    a. Pelayanan perizinan
    b. Pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN
    c. Tidak maksimalnya tugas-tugas promosi diakibatkan oleh kurangnya data potensi daerah serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas-tugas promosi
    d. Pengolahan potensi Penanaman Modal Daerah belum optimal karena kurangnya anggaran dalam Pendayagunaan Fasilitas Pengembangan Usaha

e. Lemahnya Pelayanan Penanaman Modal diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan pembinaan terhadap dunia usaha serta belum tersedianya standar operasional pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal.

13. Urusan Kebudayaan
    a. Belum Optimalnya Pelestarian Seni dan Budaya didaerah
    b. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian Seni Budaya, Situs dan kawasan cagar budaya sehingga terdapat beberapa kawasan yang belum mendapat perhatian pemerintah.

14. Kepemudaan dan Olah Raga
    a. Pengembangan potensi, kreatifitas dan keterampilan pemuda
    b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Atlet di berbagai cabang olahraga prestasi
    c. Pengangguran pemuda produktif masih tinggi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki
    d. Prestasi di bidang Olahraga masih kurang dikarenakan pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah meskipun telah dilaksanakan pembinaan pada cabang olahraga tertentu.

15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
    a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik
    b. Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi.

16. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Sekretariat Daerah)
    a. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu ditingkatkan
    b. Belum optimalnya Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
    c. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum esuai dengan beban kerja

d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

17. Urusan Ketahanan Pangan
    a. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
    b. Peningkaan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal
    c. Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
    a. Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal
    b. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal
    c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perdesaan cenderung menurun
    d. Kemampuan keuangan desa dalam menopang pembangunan masih terbatas
    e. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

19. Urusan Kearsipan
    a. Perlu segera membuat Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
    b. Diperlukan komitmen dari para pemangku kebijakan untuk segera mengalih fungsikan tenaga pengelola arsip ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan tenaga pengelola Perpustakaan ke dalam jabatan Fungsional Pustakawan.

20. Urusan komunikasi dan Informatika
    a. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahun publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
    b. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal.

21. Urusan Pertanian
    a. Masih terbatasnya pemasaran untuk memasarkan hasil produksi pertanian
    b. Masih rendahnya nilai tambah yang di dapatkan oleh para petani
    c. Terbatasnya SDM yang berkompetensi di Sektor Pertanian dan Peternakan
    d. Terbatasnya Prasarana dan Sarana pendukung
    e. Sistem Perbenihan dan Perbibitan yang belum berjalan optimal
    f. Pengelolaan Kawasan/Lahan Pertanian dan Peternakan yang belum berjalan optimal
    g. Minimnya pengetahuan dalam pengolahan hasil – hasil pertanian dan peternakan
    h. Pengelolaan Akses Pemasaran produk hasil pertanian dan peternakan
    i. Metode pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak yang belum optimal
    j. Minimnya pengelolaan pasca panen hasil pertanian dan peternakan.

22. Urusan Kehutanan
    a. Masih tingginya Tekanan dan gangguan Keamanan Hutan serta Illegal logging
    b. Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
    c. Produktifitas hasil hutan yang masih rendah
    d. Diversifikasi Produk hasil hutan yang masih minim
    e. SDM Aparatur dan Anggaran kehutanan yang masih kurang
    f. Kepastian dan pelayanan usaha di bidang kehutanan masih rendah
    g. Pemberian akses terhadap kebijakan dan informasi kehutanan rendah
    h. Peraturan perundangan bidang kehutanan belum sepenuhnya dapat diterapkan
    i. Terbatasnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan
    j. Tata batas kawasan hutan masih banyak yang belum temu gelang dan kawasan hutan masih belum berfungsi sesuai peruntukannya menyebabkan status kawasan hutan belum mantap

k. Alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan semakin meningkat
l. Cara pandang personil kehutanan belum semuanya mengikuti perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang baru
m. Masil luasnya kerusakan hutan termasuk Illegal logging merupakan dampak dari lemahnya pengawasan hutan di lapangan
n. Penegakan hukum kehutanan masih lemah.

23. Urusan Perkebunan
    a. Rendahnya nilai jual/mutu hasil perkebunan
    b. Tanaman Relatif Tua yang mempengaruhi penurunan produksi
    c. Adanya Kombun dalam Kawasan Hutan
    d. Masih banyaknya Lahan Potensial yang belum dikelola
    e. Kurangnya Sarana Produksi
    f. Belum adanya Industri Pengolahan hasil
    g. Kurangnya akses ke sentra Produksi
    h. DISBUN tidak memiliki peta permasalahan secara spasial dan termutakhirkan
    i. Penurunan produktivitas dan mutu produksi komoditas perkebunan
    j. Nilai tambah dalam proses produksi hingga pasca panen dan pengolahan hasil
    k. Keberadaan komoditas perkebunan dalam kawasan hutan
    l. Degradasi lingkungan
    m. Kapasitas petani dan kelembagaannya yang rendah
    n. Infrastruktur belum memadai
    o. Sistem pemasaran komoditas perkebunan belum kompetitif
    p. Konversi lahan perkebunan
    q. Tuntutan sustainabilitas, keamanan bagi kesehatan & penyelamatan lingkungan.

24. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
    a. Kurangnya pasokan Listrik
    b. Mitigasi bencana alam geologi
    c. Pengembangan dan Monitoring Bidang Minyak dan Gas Bumi

d. Belum optimalnya ekploitasi pada pertambangan dan pengeboran SDA
e. Rendahnya pemanfaatan dan Pengembangan Energi Terbarukan.

25. Urusan Pariwisata
    a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
    b. Belum terealisasinya dengan optimal kawasan wisata
    c. Pengembangan destinasi, sarana dan pemasaran pariwisata serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Wisata
    d. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata domestik dan internasional, hal ini disebabkan karena masih kurangnya perhatian untuk pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata serta masih kurangnya promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PDRB.

26. Urusan Kelautan dan Perikanan
    a. Masih sederhananya teknologi yang digunakan oleh para nelayan sehingga produktivitas masih rendah
    b. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di sulawesi barat, dengan segala potensi dan permasalahan yang ada, belum dioptimalkan pemanfaatannya baik dari aspek penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta pengawasan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelolanya, dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat
    c. Kondisi ekosistem seperti ekosistem terumbu karang berada pada kisaran rusak sampai kritis di semua wilayah pesisir dan ketebalan formasi mangrove yang tipis (Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat). Kondisi ini sangat memprihatinkan, olehnya itu diperlukan upaya maksimal dan secepat mungkin dalam mengatasi masalah tersebut, sebab bila tidak, bukan saja kita kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya

pangan, tapi juga hampir semua penduduk yang bermukim di wilayah pesisir terancam kehilangan mata pencaharian

d. Belum adanya laboratorium pengujian analisis residu dan ikan sakit di Sulawesi Barat, sehingga analisis dilakukan di daerah lain
e. Kurang akuratnya data kelompok usaha perikanan budidaya akibatnya identifikasi dan inventarisasi kelompok penerima bantuan membutuhkan waktu yang lama
f. Kurangnya Tenaga Profesional dalam KKMB
g. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas
h. Permasalahan pada sumber daya manusia , adalah terbatasnya pengawas di bidang Kelautan dan Perikanan baik Provinsi maupun kabupaten, selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman juga masih terbatas
i. Masalah Kelembagaan berkaitan dengan lembaga kepengawasan yang masih minim baik secara formal maupun yang bersumber dari kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat pengawas di wilayah sulawesi barat. Jumlah Pokmaswas yang aktif sampai dengan tahun 2011 berjumlah 6 kelompok.

27. Urusan Perdagangan
    a. Komoditi daerah kita yang merupakan komoditas ekspor melimpah, namun sampai saat ini pemerintah daerah belum melaksanakan perdagangan ekspor
    b. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum optimal
    c. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif
    d. Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih rendah
    e. Legalitas dan kepastian hukum usaha belum optimal
    f. Masih rendahnya daya saing produk daerah.

28. Urusan Perindustrian
    a. Pemanfaatan pengolahan komoditi daerah belum optimal, disebabkan karena Pembangunan industri yang akan menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan produktifitas tinggi belum ada

b. Persaingan di era globalisasi pasar bebas semakin meningkat
c. Prasarana infrastruktur belum memadai.

29. Urusan Ketransmigrasian
    a. Belum optimalnya bimbingan dan penyuluhan kepada para transmigran
    b. Perkembagan Unit Permukiman Transmigrasi yang dibina di Sulawesi Barat terkendala Aksesbilitas Jalan dan Sarana Prasarana pemsaran untuk pengembangan ekonomi warga transmigrasi serta pemberdayaan pembina UPT bina di setiap Lokasi yang belum maksimal dalam menagani permasalahan warga UPT di Lokasi sehingga perlu peningkatan Kapasitas SDM pembina UTP di Setiap Lokasi.

Permasalahan tersebut, akan diselaraskan dengan tema dan prioritas nasional untuk menjamin sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah, maka telah ditentukan tema RKPD 2016, yaitu **Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendayagunaan Sumber Daya Alam Lokal Berbasis Agro Industri.**

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang telah digariskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP tahun 2016 bertumpu pada 9 (Sembilan) bidang pembangunan, yaitu: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Ekonomi; (3)Sarana dan Prasarana; (4) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (6) Politik; (7) Pertahanan dan Keamanan; (8) Hukum dan Aparatur; (9) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

Berdasarkan kondisi pencapaian target Visi - Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016, maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu

:

Tabel

Identifikasi Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1.	**Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama :**	**Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan**	
	a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	
	b. Purunan Angka Kematian Ibu dan Bayi		
	c. Pengendalian Jumlah Penduduk		
	d. Sinergi Percepatan Penanggulangan		
	e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan		
		Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	
		Kualitas PAUD dan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pengembangan SMA Universal	
2.	**Ekonomi**	**Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi**	
	a. Transformasi Struktur Industri	Transformasi Struktur Industri	
	b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		
		Penerapan Kebijakan yang berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	
		Upaya Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	